

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : 11  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 17 Februari 2020  
Waktu : 14.00 s.d. 18.50 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 48 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri  
Pertanian RI) beserta jajaran;  
2. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri  
(Persero);  
3. Aas Asikin Idat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  
( *Holding Company*);  
4. Oksan O. M. Panggabean, Plt. Direktur Utama PT  
Berdikari (Persero); dan  
5. Poernomo Direktur Keuangan dan SDM PT Pertani  
(Persero).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan Anggaran Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020, sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.861.679.046.000,00 menjadi Rp1.886.679.046.000,00;
  - b. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp5.762.808.824.000,00 menjadi Rp5.612.808.824.000,00;
  - c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp3.503.898.216.000,00 menjadi Rp3.403.898.216.000,00;
  - d. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1.700.617.131.000,00 menjadi Rp1.825.617.131.000,00; dan
  - e. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp663.563.546.000,00 menjadi Rp763.563.546.000,00
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk merealokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi dan meningkatkan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 yang salah satunya diperuntukan bagi petani tambak.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah menyediakan cadangan pupuk Nasional diluar alokasi pupuk bersubsidi sebagai upaya mitigasi resiko terhadap perubahan kebutuhan setiap wilayah.
4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp5.757.944.602.211,00 antara lain:
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.271,00; dan
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.662.940,00
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan permasalahan status pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K).
6. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Undang-Undang dan workshop seluruh kegiatan Kementerian Pertanian sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengatur tata kelola kedelai dan gandum dalam rangka perlindungan petani kedelai dan jagung di Indonesia.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah agar pengadaan dan subsidi pupuk organik/hayati memiliki kualitas yang telah disetujui Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diberikan tepat waktu sesuai dengan besaran yang dibutuhkan.

9. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran Pupuk Organik yang tidak sesuai dengan standar mutu dari Kementerian Pertanian.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.50 WIB.

Menteri Pertanian,

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si.,  
M.H.

Sudin, S.E.  
A-151